

Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 – 2023

Rante Datu Patadungan¹, Khotib Umam Isnanto², Adeva Fitrianingtyas³, Aslan⁴

¹Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara

²³Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Utara

⁴Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 05, 2025

Revised May 10, 2025

Accepted May 19, 2025

Available online May 25, 2025

Kata Kunci:

Belanja Pemerintah, Pertumbuhan
Ekonomi, Kalimantan Utara

Keywords:

Government Spending, Economic
Growth, North Kalimantan



This is an open access article under the CC BY-SA
license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan
Daarul Huda

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara tercermin dari penurunan tingkat pengangguran. Pada triwulan III 2023, pertumbuhan ekonomi Kaltara menunjukkan indikator pembangunan ekonomi yang berbanding lurus dengan kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini terlihat dari grafik positif pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada periode yang sama. Belanja pemerintah difokuskan untuk meningkatkan dan melindungi kualitas hidup masyarakat, yang merupakan kewajiban bagi daerah, melalui peningkatan sektor kesehatan, pendidikan, fasilitas umum dan sosial, pelayanan dasar, serta pengembangan jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara pada periode 2013–2023. Berdasarkan hasil analisis menggunakan Uji Asumsi Klasik (meliputi Uji Linearitas, Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas), Uji Hipotesis, Uji F, Uji T, serta Uji R-Square, ditemukan bahwa, pertama, secara simultan, belanja pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara. Kedua, beberapa jenis belanja pemerintah menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan arah yang berbeda. Secara khusus, belanja pemerintah pada fungsi pelayanan umum dan ekonomi memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan pentingnya investasi dalam infrastruktur dan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Di sisi lain, belanja pemerintah pada fungsi kesehatan menunjukkan dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara.

ABSTRACT

North Kalimantan's economic growth is reflected in the decline in poverty rates. In the third quarter of 2023, North Kalimantan's economic growth showed economic development indicators that were directly proportional to the social welfare of the community. This can be seen from the positive graph of economic growth and the decline in the open poverty rate (TPT) in the same period. Government spending is focused on improving and protecting the quality of life of the community, which is an obligation for the region, through improving the health, education, public and social facilities, basic services, and developing social security sectors as regulated in Law Number 32 of 2004. This study aims to analyze the effect of regional spending on economic growth in North Kalimantan Province in the 2013–2023 period. Based on the results of the analysis using the Classical Assumption Test (including Linearity Test, Normality Test, Autocorrelation Test, Multicollinearity Test, and Heteroscedasticity Test), Hypothesis Test, F Test, T Test, and R-Square Test, it was found that, first, simultaneously, government spending has a significant effect on economic growth in North Kalimantan Province. Second, several types of government spending show significant effects on economic growth in different directions. In particular, government spending on public service and economic functions has a significant positive effect on economic growth, indicating the importance of investment in infrastructure and economic development to increase overall economic activity. On the other hand, government spending on health functions shows a significant negative effect on economic growth in North Kalimantan Province.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan di Asia Tenggara, dikategorikan sebagai negara berkembang. Karakteristik negara berkembang meliputi tingkat perekonomian yang relatif rendah, sektor industri yang kurang berkembang, skor Indeks Pembangunan Manusia berada di tingkat menengah ke

bawah, dan pendapatan perkapita yang rendah. Indonesia memiliki standar hidup relatif rendah dan sektor industri yang kurang berkembang, serta memiliki pendapatan perkapita yang rendah. Negara-negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang berarti belum mencapai tingkat negara maju, namun bukan negara gagal. Indonesia berada di antara negara gagal dan negara maju, dengan sekitar 76% negara di dunia dikategorikan sebagai negara berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, meskipun masih jauh dari harapan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2019 sebesar 5,02%, meleset dari target pemerintah sebesar 5,2%. Namun, pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,31%, yang merupakan tingkat tertinggi sejak 2014. Indonesia memiliki beberapa kelebihan yang dapat membantu mencapai kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu kelebihan adalah bonus demografi, di mana jumlah penduduk Indonesia usia produktif akan mencapai 64 persen dari total penduduk sekitar 297 juta jiwa. Bonus demografi ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah yang tinggi di berbagai sektor. Selain itu, Indonesia memiliki potensi antara lain salah satu pasar terbesar di dunia, kualitas SDM yang menguasai teknologi, inovatif, dan produktif; serta kemampuan mentransformasikan ekonominya.

Namun, Indonesia juga masih menghadapi beberapa tantangan yang dapat menghambat kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu tantangan adalah rendahnya investasi, ekspor yang didominasi produk primer, minimnya industri manufaktur, rendahnya produktivitas pekerja, besarnya pekerja sektor informal, minimnya jumlah wirausaha, serta terbatasnya instrumen sektor keuangan dan pasar modal. Dengan begitu, sedikit saja ada tekanan eksternal, berbagai indikator ekonomi langsung melemah. Untuk mencapai kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi, Indonesia harus melakukan transformasi ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah yang tinggi di berbagai sektor. Transformasi ekonomi seharusnya dilakukan antara lain dengan memperkuat sektor-sektor ekonomi prioritas, memperkuat industri manufaktur yang berorientasi ekspor, memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan kapasitas ekonomi rakyat dan meningkatkan industri kreatif. Produk dalam negeri harus mempunyai nilai tambah dan daya saing sehingga kompetitif di pasar domestik maupun internasional. Disamping itu, seluruh komponen bangsa harus membangun cinta produk dalam negeri.

Kalimantan Utara sebagai provinsi di Indonesia, memiliki ciri-ciri yang mirip dengan negara berkembang. Sebagai bagian dari Indonesia, Kalimantan Utara memiliki standar hidup yang relatif rendah dan sektor industri yang kurang berkembang. Provinsi ini memiliki pendapatan perkapita yang rendah dan memiliki tantangan dalam meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Kalimantan Utara, seperti negara berkembang, memiliki permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kekurangan modal, yang memerlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara juga diperkirakan sejalan dengan pertumbuhan perekonomian nasional. Hal ini seiring dengan prakiraan normalisasi demand komoditas bahan baku energi global di tengah ketegangan geopolitik. Selain itu, prakiraan perlambatan kinerja lapangan usaha pertambangan juga sejalan dengan siklus commodity boom yang sudah melewati fase. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara pada 2023 diperkirakan akan ditopang oleh menguatnya Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi, permintaan komoditas minyak goreng dari India dan Tiongkok diperkirakan mendorong peningkatan produksi yang diperkirakan.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara juga tercermin dalam penurunan tingkat pengangguran. Pada triwulan III 2023, pertumbuhan ekonomi Kaltara mencatatkan indikator pembangunan ekonomi yang berbanding lurus terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini tercermin dari grafik positif pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada periode yang sama. Gubernur Kalimantan Utara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum memaparkan catatan ringkas peristiwa ekonomi yang berlangsung sepanjang bulan Juli sampai September 2023, termasuk dibukanya tahun ajaran baru 2023/2024 pada bulan Juli dan persiapan sejumlah perayaan ulang tahun kabupaten dan kota. Dalam keseluruhan, Kalimantan Utara telah menunjukkan kemajuan dalam pertumbuhan ekonominya, dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tumbuh tinggi dan penurunan tingkat pengangguran. Pemekaran provinsi ini telah membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan menjadi bagian dari transformasi ekonomi Indonesia. Kalimantan Utara, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, juga telah mengalami pengaruh otonomi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mewujudkan otonomi daerah yang efektif, maka pada tahun 1999 pemerintah melakukan reformasi di bidang Pemerintahan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut membawa perubahan fundamental dalam hubungan Tata Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. (Darise 2008: 1). Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (publik

fund) melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakan. Karena sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan. (Mahmudi 2010: 155). Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya. (DJPK, 2013: 96).

Belanja pemerintah merupakan belanja atau pengeluaran yang diperuntukkan bagi kepentingan publik dalam menumbuhkan perekonomian daerah dan meningkatkan kemampuan masyarakat. Pandangan Keynesian (1936) tentang ekonomi menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam periode ketidakstabilan ekonomi. Menurut teori ini, belanja pemerintah dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan permintaan agregat dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam situasi di mana sektor swasta kurang aktif. Menurut data Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perbendaharaan Belanja Perfungsi dapat dibagi dalam 9 jenis yaitu; Pelayanan Umum, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Lingkungan Hidup, Perumahan dan Fasilitas Umum, Kesehatan, Pariwisata dan Budaya, Pendidikan dan Perlindungan Sosial Belanja perfungsi ini dianggap penting karena memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan mengalokasikan sumber daya publik secara efektif dalam sektor-sektor ini, pemerintah dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Belanja pemerintah diutamakan dalam meningkatkan dan melindungi kualitas hidup masyarakat sebagai pemenuhan yang wajib bagi daerah melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, fasilitas umum dan sosial, pelayanan dasar serta pengembangan dari jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nurmainah (2013) menyatakan peran belanja pemerintah pada negara berkembang yaitu signifikan karena terbatasnya peran swasta dalam perekonomian, karena itu dalam hal ini peran pemerintah sangat penting. Pengeluaran pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan dampak dan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Konsep-Konsep Keynesian menunjukkan bahwa peranan pemerintah sangat besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. (Murni, 2006). Sejarah mencatat bahwa pemerintah memiliki peran signifikan dalam mengatur ekonomi suatu negara. Fungsinya tidak hanya terbatas pada penyediaan layanan publik, tetapi juga mencakup stimulus ekonomi melalui kebijakan fiskal seperti belanja pemerintah. Namun menurut Yeni dkk (2017) menyatakan bahwa pengaruh alokasi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi belum bisa memacu secara signifikan, hal ini dikarenakan, meski pengalokasian dana belanja dari pemerintah baik belanja langsung maupun tidak langsung yang terus naik dan tumbuh setiap tahunnya tidak berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

TINJAUAN PUSTAKA

Belanja Pemerintah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 belanja merupakan semua kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2005 belanja merupakan suatu pengeluaran dari rekening kas umum Negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja pemerintah merupakan instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi dan sosial. Tujuan utama dari belanja pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mendukung pembangunan infrastruktur, serta mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Belanja pemerintah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk berbagai keperluan dan tujuan. Pengeluaran ini mencakup semua aktivitas keuangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi-fungsinya sebagai regulator, penyedia layanan publik, dan pengelola kebijakan ekonomi. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu kebijakan fiskal yang bertujuan menstabilkan harga, tingkat output perekonomian, kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2014).

Pengeluaran pemerintah memiliki efek pengali yang berarti bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah yang dimaksudkan untuk merangsang ekonomi menyebabkan peningkatan pengeluaran swasta, yang juga merangsang perekonomian (Mankiw, 2015). Di sisi lain, pengeluaran pemerintah dapat juga menimbulkan efek crowding-out terhadap pengeluaran privat yang berdampak pada penurunan

pertumbuhan ekonomi. Efek ini merupakan kebalikan dari efek pengali dari pengeluaran pemerintah. Menurut Spencer dan Yohe (1970), kenaikan pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan peningkatan penerimaan pajak atau melalui penerbitan obligasi merupakan transfer sumber daya dari sektor privat ke sektor publik sehingga dapat menimbulkan efek crowding-out konsumsi privat dan membuat *multiplier effect* dari pengeluaran pemerintah tersebut lemah atau bahkan meniadakannya sehingga dalam praktiknya, tidak ada *multiplier effect* yang tercipta dari pengeluaran pemerintah. Kebijakan pengeluaran dan penerimaan pemerintah tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk nasional, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.02 Paragraf 7, belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut PSAP No.02, belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut penelitian Amri Amir pada tahun (2007) dalam penelitian Firdhania dan Muslihatinningsih (2017), pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Menurut Endogenous Growth Theory (1986): Teori pertumbuhan endogen mengemukakan bahwa faktor-faktor seperti inovasi, penelitian dan pengembangan (R&D) memiliki peran kunci dalam mempengaruhi pertumbuhan jangka panjang suatu ekonomi. Diantara para ahli yang menyumbangkan teori ini adalah Paul Romer dan Robert Lucas.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan secara berkelanjutan dari output ekonomi suatu negara atau wilayah. Pandangan para ahli ekonomi tentang faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi beragam, namun beberapa factor yang sering disebutkan termasuk spesialisasi, perdagangan internasional, teknologi, modal, inovasi, dan pendidikan.

Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja pemerintah merupakan belanja atau pengeluaran yang diperuntukkan bagi kepentingan publik dalam menumbuhkan perekonomian daerah dan meningkatkan kemampuan masyarakat. Belanja pemerintah diutamakan dalam meningkatkan dan melindungi kualitas hidup masyarakat sebagai pemenuhan yang wajib bagi daerah melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, fasilitas umum dan sosial, pelayanan dasar serta pengembangan dari jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nurmainah (2013) menyatakan peran belanja pemerintah pada negara berkembang yaitu signifikan karena terbatasnya peran swasta dalam perekonomian, karena itu dalam hal ini peran pemerintah sangat penting. Belanja daerah mencerminkan program dan kegiatan pemerintah untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Jika jumlah belanja mengalami peningkatan, maka idealnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan perubahan produk domestik regional bruto (PDRB). Secara teori, belanja pemerintah dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung. Jika belanja pemerintah dirinci berdasarkan komponennya, maka dapat diketahui peran masing-masing komponen belanja terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Devarajan et al. (1996), belanja pemerintah dikategorikan produktif dilihat dari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja yang bersifat produktif akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penafsiran dampak positif atau negatif tersebut sulit dilakukan pada belanja secara agregat. Hal ini dikarenakan komponen belanja sulit dikelompokkan menurut sifat produktifnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian atas pengaruh masing-masing komponen belanja pemerintah daerah berdasarkan fungsi.

Hasil dari penelitian pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menemukan bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada semua negara sampel dalam jangka pendek. Selain itu, ditemukannya juga bahwa terdapat hubungan kausalitas dari pertumbuhan ekonomi ke pengeluaran pemerintah, serta hubungan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah investasi swasta, investasi pemerintah, belanja konsumsi, angkatan kerja, dan derajat keterbukaan.

METODE PENELITIAN

Teknik Analisa Data

1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik merupakan prasyarat dalam analisis regresi yang menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan metode estimasi OLS, dalam penelitian ini dalam menguji Asumsi Klasik meliputi Uji Linieritas, Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas.

2. Uji Hipotesis

- H_a : Variabel Independen tidak berpengaruh terhadap variable dependen
- H_o : Variabel Independen berpengaruh terhadap variable dependen

3. Uji F (Uji Simultan)

Uji F atau uji simultan ini pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Cara yang digunakan ialah dengan melihat besarnya nilai probabilitas signifikan-nya. Menurut Imam Ghazali (2018:115), Apabila nilai probabilitas signifikannya $< 5\%$ maka variabel independen atau variabel bebas akan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Adapun dasar pengambilan kesimpulan pada uji F ialah sebagai berikut:

- Apabila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan jika probabilitas (signifikasi) $> 0,05(\alpha)$, maka H_o diterima, artinya variabel independen secara simultan atau bersama- sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan jika probabilitas (signifikasi) lebih kecil dari $0,05(\alpha)$, maka H_a ditolak, artinya variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

4. Uji T (Uji Parsial)

Uji t atau uji parsial dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh suatu variabel independen secara parsial terhadap variasi variabel dependen. Adapun dasar pengambilan kesimpulan pada uji t Menurut Ghazali (2016) ialah sebagai berikut:

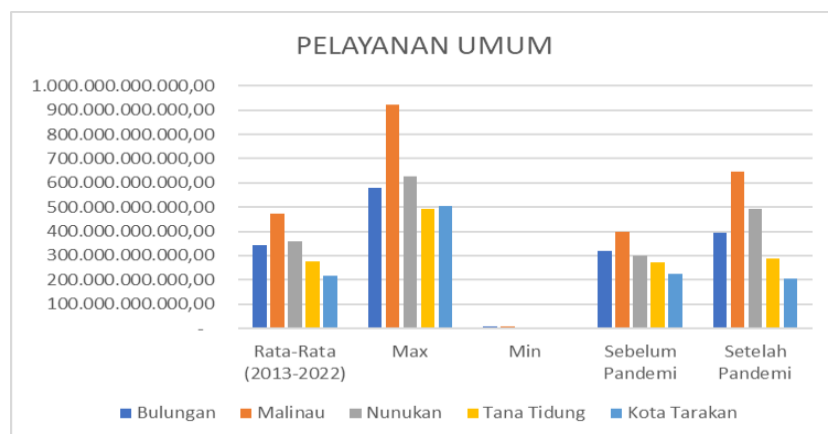
- Apabila nilai signifikasi $> 0,05 (\alpha)$, maka H_a diterima, artinya variabel independen secara parsial (individual) tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- Apabila nilai (signifikasi) $< 0,05(\alpha)$, maka H_o ditolak, artinya variabel independen secara parsial (individual) mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

5. Uji R (Rsquare)

Menurut Ghazali (2021) uji koefisien determinasi yaitu suatu nilai yang menggambarkan bagaimana sebuah perubahan dari variabel dependen dapat dijabarkan oleh suatu perubahan dari variabel independen. Uji R^2 dijalankan untuk mengetahui seberapa besarkah variabel independen secara bersama-sama atau simultan menerangkan variasi variabel dependen. Dalam menguji R^2 peneliti menyimpulkan berdasarkan tabel Model Summary.

HASIL DAN PEMBAHASAN

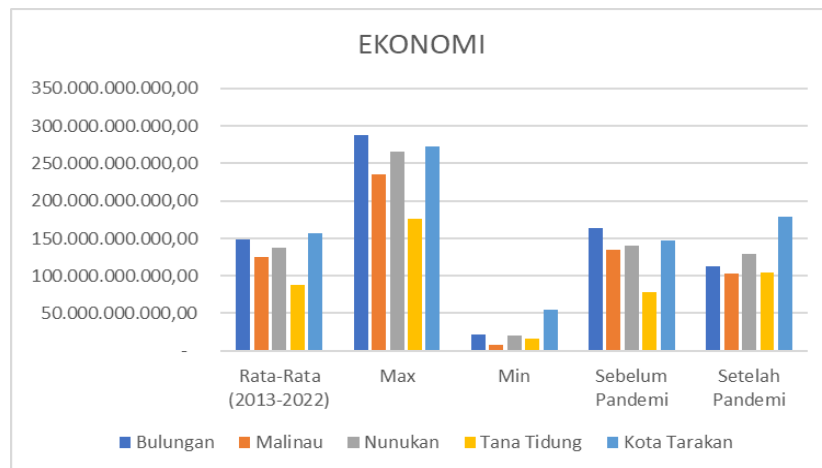
Belanja Pemerintah



Sumber Data : DJPK diolah Penulis

Grafik 1. Anggaran Belanja Fungsi Pelayanan Umum Provinsi Kalimantan Utara (2013-2022)

Pada Grafik 1 Selama 10 tahun terakhir, analisis anggaran menunjukkan pola yang menarik antara Kabupaten Tana Tidung dan Kota Malinau, terutama dalam konteks fungsi pelayanan umum. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Tidung memiliki anggaran pelayanan umum yang paling rendah, baik dalam aspek maksimum maupun minimum. Sebaliknya, Kota Malinau menonjol dengan anggaran yang paling tinggi dalam kategori yang sama, baik dari segi maksimum maupun minimum. Dengan menggabungkan data dari tahun 2013 hingga 2022, pola tersebut semakin terkonfirmasi: Kabupaten Tana Tidung secara konsisten mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk fungsi pelayanan umum dibandingkan dengan Kota Tarakan. Hal ini bisa menjadi refleksi dari dinamika ekonomi, demografi, serta infrastruktur dan layanan masyarakat lainnya di kedua wilayah tersebut.

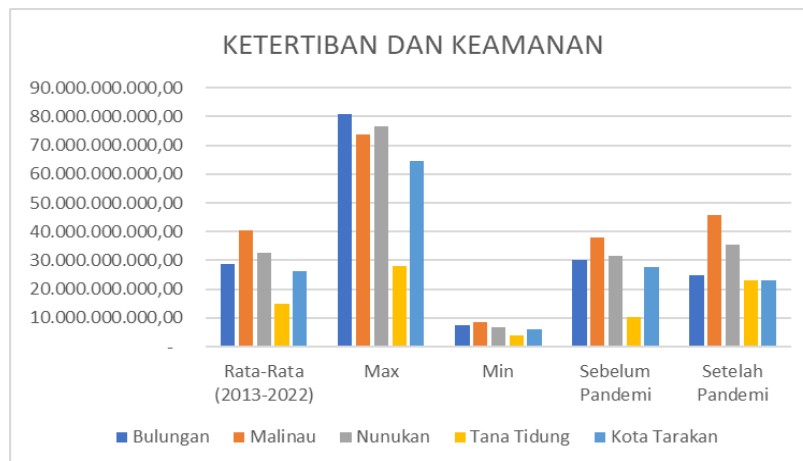


Sumber Data : DJPK diolah Penulis

Grafik 2. Anggaran Belanja Fungsi Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara (2013-2022)

Jika ingin Melihat Anggaran tertinggi pada Kota Tarakan terletak pada Fungsi Ekonomi seperti yang tertera pada Grafik 2 , kita dapat melihat sebuah gambaran yang cukup jelas mengenai distribusi anggaran pada beberapa kota dan kabupaten di wilayah tersebut, terutama dalam konteks fungsi ekonomi. Dikatakan bahwa Kota Tarakan memiliki anggaran tertinggi dalam hal fungsi ekonomi, yang sesuai dengan perkembangan pembangunan yang pesat di kota tersebut. Data anggaran, baik rata-rata, maksimum, maupun minimum, menunjukkan dominasi Kota Tarakan dalam hal ini. Namun, meskipun Kota Tarakan mendominasi dalam anggaran tertinggi, kabupaten lain seperti Tana Tidung juga disebutkan memiliki anggaran terendah dalam 10 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya disparitas dalam distribusi anggaran di wilayah tersebut. Kabupaten Malinau juga disebutkan memiliki anggaran terendah jika dilihat dari data minimum. Kota Tarakan adalah pusat ekonomi yang kuat dalam wilayah tersebut, sementara beberapa kabupaten lainnya, seperti Tana Tidung dan Malinau, menghadapi tantangan dalam pengalokasian anggaran untuk pembangunan ekonomi mereka. Ini bisa menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi anggaran dan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.

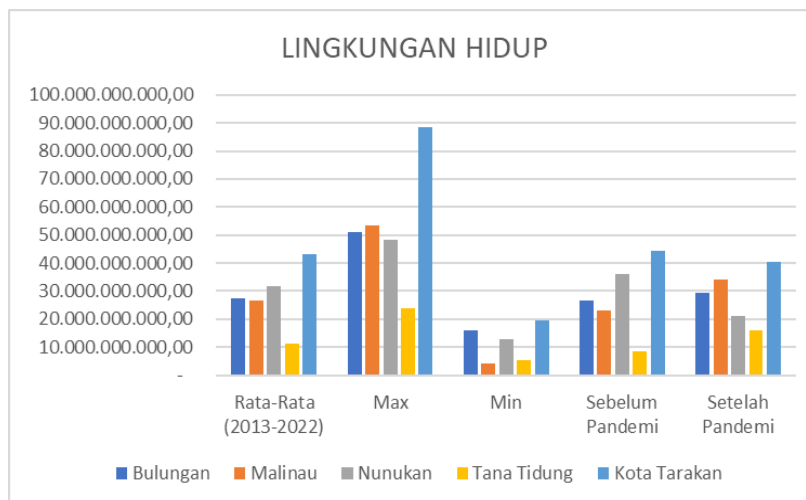
Selanjutnya pada Grafik 3 Belanja Fungsi Ketertiban dan keamanan . Dalam konteks fungsi ketertiban dan keamanan, analisis anggaran selama 10 tahun terakhir mengungkapkan fakta menarik tentang distribusi anggaran di beberapa kota dan kabupaten di wilayah tersebut. Menurut data yang disajikan, Kota Malinau menonjol sebagai kota dengan hasil anggaran tertinggi dalam hal rata-rata anggaran selama periode tersebut. Hal ini menandakan fokus yang signifikan dari pemerintah daerah dalam memprioritaskan ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut. Analisis lebih lanjut dapat membantu memahami faktor-faktor di balik keputusan alokasi anggaran dan implikasinya terhadap tingkat ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut.



Sumber Data : DJPK diolah Penulis

Grafik 3. Anggaran Belanja Fungsi Ketertiban Keamanan Provinsi Kalimantan Utara (2013-2022)

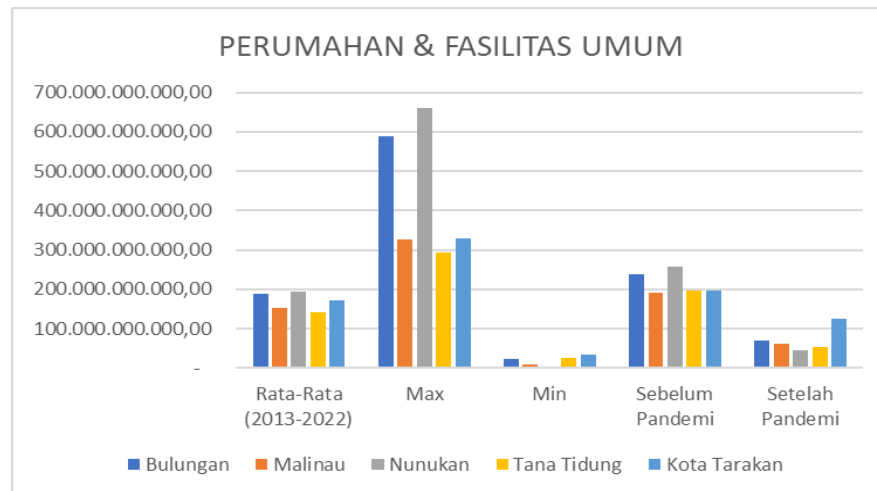
Tidak hanya pada Fungsi Ekonomi Tarakan juga menjadi kabupaten yang sangat tinggi anggarannya pada fungsi Lingkungan Hidup. Kota Tarakan menonjol sebagai kabupaten dengan anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa menjadi hasil dari beberapa faktor yang kompleks namun relevan dengan kondisi lingkungan hidup di kota tersebut. Salah satu faktor utama yang mungkin menyebabkan Kota Tarakan memiliki anggaran tertinggi dalam fungsi lingkungan hidup adalah padatnya populasi. Seperti yang telah diketahui, Tarakan adalah salah satu kota yang padat penduduknya. Kepadatan penduduk ini secara langsung berhubungan dengan peningkatan kegiatan manusia di daerah tersebut, yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan. Dalam artikel yang disebutkan, masalah tumpukan sampah di Kota Tarakan menjadi sorotan yang serius, menyoroti hubungan erat antara pertumbuhan populasi dan jumlah sampah yang dihasilkan.



Sumber Data : DJPK diolah Penulis

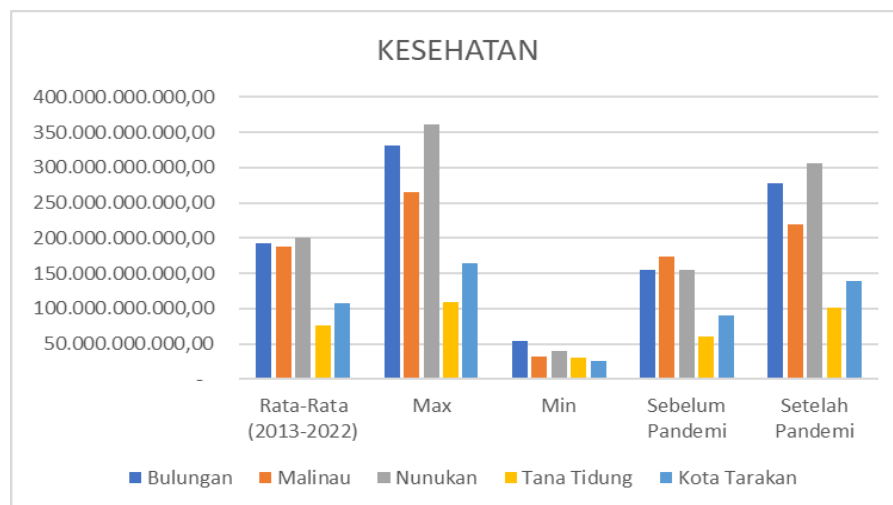
Grafik 4. Anggaran Belanja Fungsi Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara (2013-2022)

Selanjutnya Fungsi perumahan dan fasilitas umum menjadi aspek penting dalam pembangunan suatu wilayah, dan dalam konteks Provinsi Kalimantan Utara. Dapat dilihat pada Grafik 5, Kabupaten Bulungan menonjol dengan anggaran tertinggi dalam hal ini. Hal ini tidak mengherankan mengingat Bulungan adalah ibu kota provinsi, yang secara alami menjadi pusat aktivitas administratif dan pemerintahan. Dengan keberadaan kantor daerah dan infrastruktur yang terus berkembang, anggaran yang dialokasikan untuk fungsi perumahan dan fasilitas umum di Bulungan menjadi wajar dan diharapkan..



Sumber Data : DJPK diolah Penulis

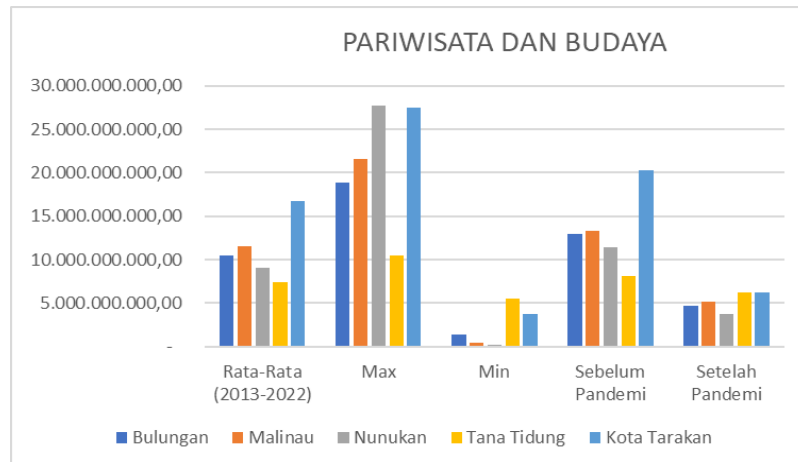
Grafik 5. Anggaran Belanja Fungsi Perumahan & Fasilitas Umum Provinsi Kalimantan Utara (2013-2022)



Sumber Data : DJPK diolah Penulis

Grafik 6. Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara (2013-2022)

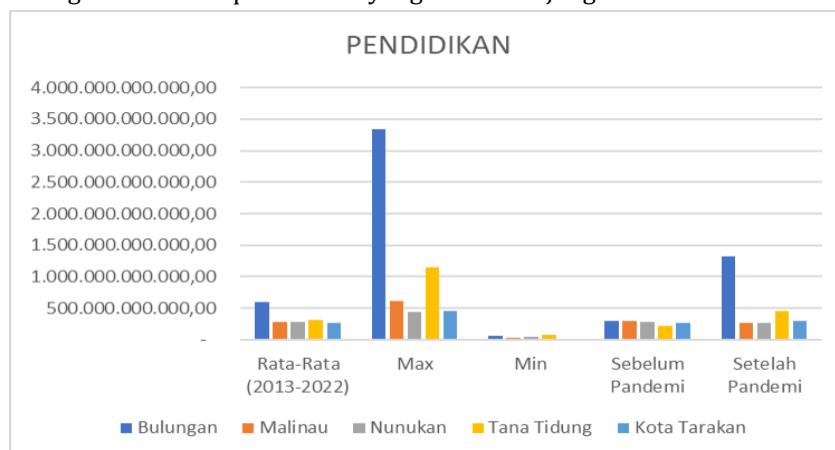
Kemudian Grafik 6 yang menunjukkan anggaran Belanja Fungsi Kesehatan selama 10 tahun terakhir, Kabupaten Nunukan menonjol sebagai kabupaten dengan anggaran tertinggi. Fenomena ini disebabkan oleh sejumlah program kesehatan yang telah diimplementasikan, dengan fokus pada peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Pentingnya infrastruktur kesehatan di Nunukan, terutama sebagai daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, menjadi kunci dalam menyediakan layanan kesehatan bagi penduduk yang berasal dari dalam dan luar negeri yang menggunakan daerah ini sebagai tempat persinggahan. Di sisi lain, Kabupaten Tana Tidung mengalami tantangan yang berbeda dengan menjadi daerah dengan anggaran terendah dalam fungsi kesehatan. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan anggaran yang belum efektif dan efisien oleh dinas kesehatan dan puskesmas setempat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan dalam hal sumber daya manusia, pengelolaan data, dan komitmen untuk memprioritaskan kepentingan kesehatan masyarakat. Komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, bersama dengan peningkatan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, akan menjadi kunci dalam meningkatkan capaian indikator kesehatan yang kritis ini.



Sumber Data : DJPK diolah Penulis

Grafik 7. Anggaran Belanja Fungsi Pariwisata Budaya Provinsi Kalimantan Utara (2013-2022)

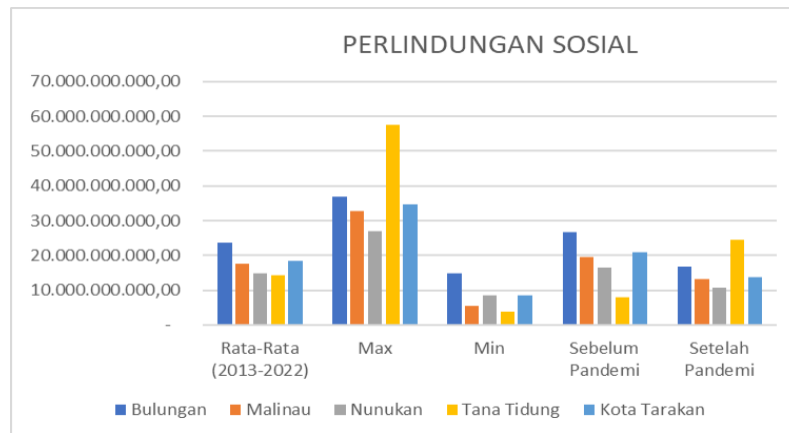
Dalam fungsi anggaran pariwisata dan budaya, Kota Tarakan jelas unggul dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini tidak mengherankan mengingat Tarakan memiliki daya tarik pariwisata yang sangat kuat dan keanekaragaman budaya yang kaya. Tarakan menawarkan pengalaman budaya yang kaya dengan berbagai acara tradisional, festival, dan ritual adat yang menarik. Ini memberi peluang bagi wisatawan untuk memahami dan mengalami kekayaan budaya lokal. Selain itu, destinasi wisata sejarah seperti Monumen Perjuangan Rakyat Tarakan dan Museum Mulawarman menyajikan cerita-cerita menarik tentang sejarah daerah tersebut. Wisata alam juga menjadi daya tarik yang signifikan di Tarakan, dengan pantai-pantai indah, hutan mangrove, dan kehidupan laut yang menakjubkan. Dari pulau-pulau kecil yang eksotis hingga taman nasional yang menakjubkan, Tarakan menawarkan berbagai pilihan untuk para penggemar alam. Tidak hanya itu, Tarakan juga merupakan tempat yang ideal untuk berbelanja dengan berbagai pusat perbelanjaan modern dan pasar tradisional yang menawarkan berbagai macam barang dan souvenir. Wisata agro juga menjadi daya tarik tersendiri di Tarakan, dengan berbagai kebun dan peternakan yang bisa dikunjungi.



Sumber Data : DJPK diolah Penulis

Grafik 8. Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara (2013-2022)

Selama 10 tahun terakhir, Kabupaten Bulungan telah menjadi sorotan dengan rata-rata anggaran tertinggi, termasuk dalam periode selama dan sesudah pandemi pada tahun 2020-2022. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya untuk sektor pendidikan dan kebudayaan. Namun, keberhasilan dalam penyerapan anggaran belanja langsung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulungan tidak hanya bergantung pada jumlah anggaran yang tersedia, meskipun Bulungan menonjol dengan anggaran tertinggi, Nunukan memiliki anggaran maksimum yang lebih tinggi, sementara Malinau memiliki rata-rata anggaran yang lebih tinggi sebelum pandemi. Ini menunjukkan bahwa masing-masing kabupaten memiliki dinamika dan tantangan tersendiri dalam mengelola anggaran belanja langsung.

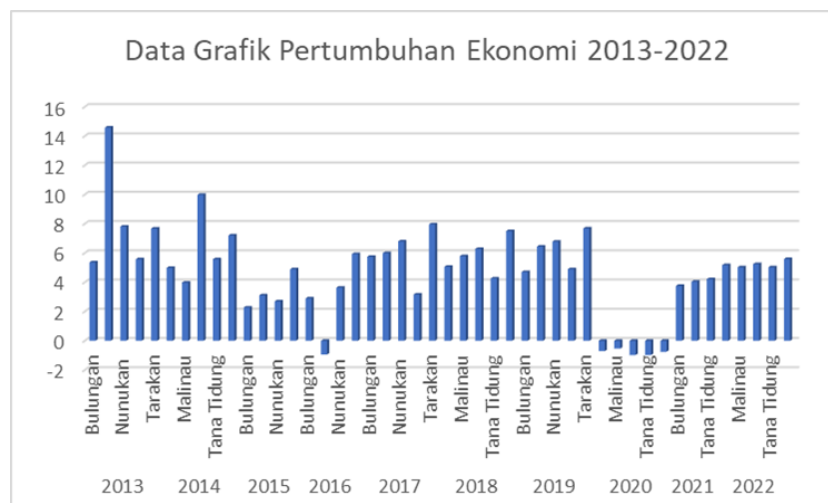


Sumber Data : DJPK diolah Penulis

Grafik 9. Anggaran Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Provinsi Kalimantan Utara (2013-2022)

Pada Grafik 9 bisa dilihat bahwa pada Anggaran Belanja fungsi Perlindungan sosial, Kabupaten Bulungan memang telah mencatat rata-rata anggaran tertinggi, termasuk dalam tabel minimal anggaran serta tabel sebelum masa pandemi tahun 2013-2019. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah Bulungan dalam mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, pergeseran terjadi saat masa pandemi, di mana anggaran tertinggi beralih ke Kabupaten Tana Tidung.

Pertumbuhan Ekonomi



Sumber Data : BPS diolah Penulis

Grafik 10. Data Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara (2013-2022)

Pada Tabel diatas dapat dilihat naik turunnya Pertumbuhan Ekonomi selama 10 tahun terakhir. Dimulai dari tahun 2013 yang menunjukkan Pertumbuhan paling tinggi yaitu pada Kota malinau yang mencapai 14,58%, Pertumbuhan di Malinau pada tahun 2013 sangat tinggi karena beberapa faktor. Pertama, pertumbuhan penduduk Malinau mengalami percepatan yang cukup berarti, dengan jumlah penduduk meningkat dari 538.137 jiwa pada tahun 2011 menjadi 550.027 jiwa pada tahun 2012 dan 580.348 jiwa pada tahun 2013. Kenaikan penduduk ini disebabkan oleh perubahan struktur umur penduduk dan migrasi penduduk, yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Malinau. Kedua, pengeluaran pemerintah daerah Malinau juga meningkat secara signifikan. Pada tahun 2013, pengeluaran rutin pemerintah mencapai Rp 1.543.445,-, meningkat dari Rp 946.114,- pada tahun 2010 dan Rp 1.073.472,- pada tahun 2012. Pengeluaran pemerintah yang lebih besar dapat meningkatkan tingkat perekonomian suatu daerah, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, Malinau memiliki potensi sumberdaya alam yang besar, termasuk kehutanan, hasil laut, sumberdaya mineral, pertanian, dan perkebunan. Selama periode 2012-2013, kinerja perekonomian Provinsi Kalimantan Utara secara umum relatif baik, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,95 persen pada tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan di Malinau pada tahun 2013.

Dalam sintesis, pertumbuhan di Malinau pada tahun 2013 sangat tinggi karena kombinasi dari kenaikan penduduk, pengeluaran pemerintah yang lebih besar, dan potensi sumberdaya alam yang besar.

Pada tahun 2014 Malinau menjadi Kabupaten di Kalimantan Utara yang sangat rendah penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau pada tahun 2013 dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk fluktuasi dalam pengeluaran pemerintah dan investasi, serta perubahan struktur sektor ekonomi yang lebih banyak didominasi oleh sektor primer seperti pertanian dan pertambangan. Kemudian pada tahun 2015 angka pertumbuhan ekonomi di kabupaten Malinau lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten bulungan dan kabupaten nunukan. Dimana jika dilihat pada tahun 2014 Nunukan adalah kabupaten dengan angka pertumbuhan Ekonomi yang paling tinggi. Pada tahun 2016 angka pertumbuhan ekonomi pada kabupaten malinau semakin turun sehingga menjadi -0,98 sehingga pada tahun ini Malinau Kembali menjadi kabupaten dengan angka pertumbuhan Ekonomi paling Rendah dan dan yang paling tinggi yaitu pada kota Tarakan. Selanjutnya Pada tahun 2018 dan 2019 angka pertumbuhan Ekonomi pada tiap kabupaten sudah mulai stabil terlebih pada kota Malinau yang dimana jika dilihat pada tahun sebelumnya mencapai angka minus. Namun jika dilihat pada tahun 2020 untuk semua angka pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara mencapai minus dimana hal tersebut dipengaruhi karena masa pandemi covid.

Kalimantan Utara mengalami tantangan tambahan seperti infrastruktur yang belum memadai atau ketergantungan pada sektor-sektor yang lebih rentan terhadap goncangan ekonomi global. Penting juga untuk mempertimbangkan berbagai kebijakan pemerintah setempat dan nasional yang diterapkan sebagai respons terhadap pandemi, serta upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi. Meskipun kondisi pada tahun 2020 mungkin sulit, pemulihan ekonomi dapat terjadi dengan adanya langkah-langkah stimulus, reformasi kebijakan, dan adaptasi terhadap kondisi baru yang diakibatkan oleh pandemi. Namun tetap saja Pemerintah Provinsi tetap optimis untuk meningkatkan Kembali pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya. Adapun salah satu Upaya pemerintah Kalimantan Utara untuk meningkatkan pertumbuhan Ekonomi yaitu Pembangunan Ekonomi Hijau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memfokuskan pembangunan ekonomi hijau, yang melibatkan upaya rehabilitasi hutan dan lahan, pengamanan kebakaran hutan dan lahan, serta pengembangan lingkungan di kabupaten/kota melalui transfer anggaran provinsi berbasis ekologi (TAPE) dan Pengembangan Industri Primer, Pengolahan, dan Jasa Perencanaan Pembangunan diarahkan pada Pengembangan dan Penguatan secara luas yang meliputi industri primer, pengolahan, ketenagalistrikan, perdagangan dan jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta industri kecil dan menengah.

Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 1 Uji Normalitas

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Std. Deviation	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	46	-4.54402	6.64862	2.20738815	.302	.350	1.243	.688
Valid N (listwise)	46							

Pada tabel 1 nilai Skewness dan Kurtosis, dimana dalam membuktikan Uji Normalitas Nilai skewness $0,302/0,350 = 0,862$ dan Nilai Kurtosis $1,243/0,688 = 1,806$. Yang berarti kedua nilai tersebut dapat dikatakan data memenuhi asumsi normal.

Uji Multikoloneritas

Tabel 2 Uji Multikoloneritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.643	1.106		.581	.565		
Pelayanan Umum	5.749E-12	.000	.467	2.328	.026	.374	2.674
Ketertiba Keamanan	1.349E-11	.000	.086	.551	.585	.615	1.626
Ekonomi	2.101E-11	.000	.552	3.037	.004	.455	2.198
Lingkungan Hidup	2.310E-11	.000	.139	.883	.383	.605	1.653
Perumahan Fasilitas Umum	2.118E-12	.000	.097	.621	.539	.611	1.638
Kesehatan	-1.428E-11	.000	-.407	-2.040	.049	.378	2.643
Pariwisata Budaya	7.060E-11	.000	.171	.998	.325	.511	1.956
Pendidikan	1.025E-12	.000	.166	1.162	.253	.739	1.353
Perlindungan Sosial	-4.697E-11	.000	-.165	-1.092	.282	.657	1.522

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Data yang baik seharusnya tidak terjadi gejala multikoloneriaritas, Dalam uji ini untuk melihat hasilnya melalui tolerance value dan variance inflation factor (VIF) yang mana batas ukuran yaitu tolerance value adalah 0.1 dan VIF adalah 10. Jika tolerance value ≥ 0.10 atau VIF ≤ 10 maka tidak terjadi gejala multikoloneritas (Ghozali, 2013). Pada table 2 kita bisa melihat bahwa dari 9 variabel yang ada nilai VIF < 10 yang berarti tidak terjadi gejala multikoloneritas.

Uji Heterokedsitas

Tabel 3. Uji Heterokedsitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.722	.617		1.171	.249		
Pelayanan Umum	1.545E-12	.000	.246	1.122	.269	.374	2.674
Ketertiba Keamanan	7.865E-12	.000	.099	.577	.568	.615	1.626
Ekonomi	-4.157E-12	.000	-.214	-1.078	.288	.455	2.198
Lingkungan Hidup	-2.189E-11	.000	-.259	-1.501	.142	.605	1.653
Perumahan Fasilitas Umum	2.312E-12	.000	.209	1.215	.232	.611	1.638
Kesehatan	3.714E-12	.000	.208	.951	.348	.378	2.643
Pariwisata Budaya	1.131E-11	.000	.054	.287	.776	.511	1.956
Pendidikan	-5.825E-13	.000	-.185	-1.184	.244	.739	1.353
Perlindungan Sosial	2.037E-11	.000	.141	.849	.401	.657	1.522

a. Dependent Variable: abresid

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jika variabel independen secara statistik menunjukkan nilai probabilitas signifikansinya > 0.05 , maka tidak terjadi masalah 52 heteroskedastisitas. Pada output tabel 3 di sig 9 variabel tersebut tidak signifikan sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi masalah heterokedstitas.

Uji Autokolerasi

Tabel 4. Uji Autokolerasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.14291
Cases < Test Value	23
Cases $\geq$ Test Value	23
Total Cases	46
Number of Runs	19
Z	-1.342
Asymp. Sig. (2-tailed)	.180

a. Median

Dari hasil Output pada tabel , sudah terlampir hasil dari Asymp.Sig (2-tailed) yaitu $0,180 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat gejala autokorelasi.

Hasil Uji Hipotesis

UJI F

Tabel 5. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	185.264	9	20.585	3.380	.004 ^b
	Residual	219.265	36	6.091		
	Total	404.530	45			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

b. Predictors: (Constant), Perlindungan Sosial, Pendidikan, Ketertiba Keamanan, Pelayanan Umum, Perumahan Fasilitas Umum, Lingkungan Hidup, Ekonomi, Pariwisata Budaya, Kesehatan

data yang diperoleh. $F_{hitung} = 3,380$ dan $F_{tabel} = 2,11$, Dari hasil tersebut dapat di buktikan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yang berarti berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pertumbuhan Ekonomi .

UJI T

Tabel 6. Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.643	1.106		.581	.565		
Pelayanan Umum	5.749E-12	.000	.467	2.328	.026	.374	2.674
Ketertiba Keamanan	1.349E-11	.000	.086	.551	.585	.615	1.626
Ekonomi	2.101E-11	.000	.552	3.037	.004	.455	2.198
Lingkungan Hidup	2.310E-11	.000	.139	.883	.383	.605	1.653
Perumahan Fasilitas Umum	2.118E-12	.000	.097	.621	.539	.611	1.638
Kesehatan	-1.428E-11	.000	-.407	-2.040	.049	.378	2.643
Pariwisata Budaya	7.060E-11	.000	.171	.998	.325	.511	1.956
Pendidikan	1.025E-12	.000	.166	1.162	.253	.739	1.353
Perlindungan Sosial	-4.697E-11	.000	-.165	-1.092	.282	.657	1.522

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Nilai Sig Belanja Pelayanan Umum $0,026 < 0,050$ maka berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Belanja Pelayanan Umum berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi karena beberapa alasan. Pertama, belanja pelayanan umum dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam perekonomian. Kedua, pelayanan umum yang lebih baik dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah, yang dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang Ketiga, belanja pelayanan umum dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah dalam penggunaan sumber daya, yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan penggunaan sumber daya yang efektif.

Dalam Penelitian ini Nilai Sig Belanja Ketertiban dan Keamanan $0,585 > 0,050$ maka dinyatakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan keamanan publik, penegakan hukum, dan sistem keamanan nasional yang dapat membantu mengurangi risiko yang terkait dengan aktivitas teroris atau kriminal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Nilai sig Belanja Ekonomi $0,004 < 0,050$ maka dinyatakan berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Belanja Ekonomi berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi karena investasi dalam infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan teknologi, pengembangan sumber daya alam, dan pengembangan industri. di Kalimantan Utara terus meningkat proyek dan rencana telah dilakukan mampu meningkatkan produksi dan penambahan tenaga kerja

Nilai sig Belanja Lingkungan Hidup maka dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi karena belanja untuk fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tujuan menjaga kualitas lingkungan hidup, bukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Wawan Hermawan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, menemukan bahwa belanja pemerintah untuk fungsi lingkungan hidup memiliki efek yang sangat kecil terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 0.01% jika tidak ada tambahan pertumbuhan dalam belanja lainnya untuk fungsi lingkungan hidup.

Nilai sig Belanja Perumahan Fasilitas dan Umum $0,539 > 0,050$ maka dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan bahwa pengembang harus membangun fasilitas sosial atau fasilitas umum, serta kesiapan lahan di Kalimantan Utara masih sulit dan kompleks yang berdampak pada keterlambatan dan kenaikan biaya dalam pengembangan perumahan dan fasilitas umum. Hal tersebut dapat menyebabkan peningkatan harga jual atau sewa. Ini kemudian dapat mengurangi daya beli masyarakat terhadap perumahan.

Nilai sig Belanja Kesehatan $0,049 < 0,050$ maka dinyatakan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, namun memiliki pengaruh negatif. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, di mana belanja kesehatan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Penelitian lainnya di Provinsi Sulawesi Utara juga menemukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan. Hasil ini menunjukkan bahwa, walaupun belanja kesehatan dapat memiliki dampak positif pada kesehatan masyarakat, namun dalam beberapa kasus, pengeluaran yang besar untuk kesehatan tidak secara langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat berarti bahwa belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah belum mendukung pencapaian kinerja di bidang Kesehatan yang lebih baik Nilai sig

Belanja Pariwisata dan Budaya $0,325 > 0,050$ maka dinyatakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Nilai Belanja Pendidikan $0,253 > 0,050$ maka dinyatakan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dari sini dapat dilihat bahwa Belanja pendidikan tidak secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh faktor-faktor seperti modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Pendidikan, walaupun sangat vital, tidak memiliki implikasi langsung pada pertumbuhan ekonomi. Pendidikan lebih berfokus pada pengembangan sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung melalui peningkatan produktivitas dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Nilai sig Belanja Perlindungan Sosial $0,282 > 0,050$ maka tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak belanja perlindungan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi mungkin tidak langsung dan memerlukan waktu yang lebih panjang. Program ini dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi tidak secara langsung. Dimana Belanja perlindungan sosial lebih fokus pada meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan, daripada langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Program ini berfokus pada bantuan sosial dan jaminan sosial yang membantu masyarakat yang rentan dan miskin, sehingga tidak secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Sehingga dapat disimpulkan yang berpengaruh signifikan terdapat 3 variabel yaitu Variabel Pelayanan Umum, Ekonomi dan Kesehatan. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengalokasikan belanja publik untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari beragam fungsi belanja pemerintah, ada tiga yang secara signifikan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni Pelayanan Umum, Ekonomi, dan Kesehatan. Dengan memprioritaskan belanja publik pada ketiga fungsi tersebut, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi negara untuk bersaing dalam pasar global yang semakin kompleks.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.677 ^a	.458	.322	2.46793

a. Predictors: (Constant), Perlindungan Sosial, Pendidikan, Keterlambatan Keamanan, Pelayanan Umum, Perumahan Fasilitas Umum, Lingkungan Hidup, Ekonomi, Pariwisata Budaya, Kesehatan

Dari output tersebut kita telah mendapati nilai Adjusted R Square adalah 0,322 atau 32,2%, artinya pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah 67,8% sedangkan sisanya ($100\% - 67,8\%$) 32,2 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di bahas dalam penelitian ini.

SIMPULAN

1. Dari data alokasi belanja pemerintah di Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2013-2022, dapat disimpulkan bahwa Belanja Pendidikan mendominasi sebagai variabel dengan anggaran tertinggi dalam belanja perfungsi. Ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mengakui pentingnya investasi jangka panjang dalam sumber daya manusia yang berkualitas, serta merespons tantangan-tantangan khusus dalam pengembangan pendidikan. Keputusan ini juga mencerminkan prioritas kebijakan yang diberikan pada sektor pendidikan sebagai fondasi untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.
2. Berdasarkan hasil uji statistik yang menyatakan bahwa pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara hanya mencapai 32,2% dalam rentang waktu tahun 2013-2022, dapat disimpulkan bahwa faktor lain di luar belanja pemerintah juga berperan penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Meskipun belanja pemerintah memiliki dampak yang signifikan, masih ada variabel lain seperti investasi swasta, kondisi pasar global, faktor politik, dan faktor-faktor lokal lainnya yang turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami kontribusi faktor-faktor lain dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara.

3. Dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa secara simultan belanja pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal memainkan peran krusial dalam menggerakkan roda ekonomi. Pengeluaran pemerintah tidak hanya menciptakan demand secara langsung melalui belanja infrastruktur dan program sosial, tetapi juga memicu multiplier effect yang berdampak positif pada sektor-sektor lain dalam perekonomian. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran pemerintah dengan bijaksana dan efisien dapat menjadi kunci untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.
4. Dari hasil analisis secara parsial, dapat disimpulkan bahwa beberapa jenis fungsi belanja pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan arah yang berbeda. Secara khusus, belanja pemerintah pada fungsi pelayanan umum dan ekonomi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menunjukkan pentingnya investasi dalam infrastruktur dan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Di sisi lain, belanja pemerintah pada fungsi kesehatan menunjukkan dampak negatif yang signifikan, mungkin mengindikasikan adanya potensi in efisiensi atau masalah dalam pengelolaan sektor kesehatan yang perlu ditangani.

REKOMENDASI

1. Saran Penulis adalah untuk tetap mengoptimalkan belanja pelayanan umum dan ekonomi yang sudah berpengaruh positif, ke depannya dengan terus memperhatikan efektivitas dan alokasi dana pada belanja tersebut. Penting untuk terus mengevaluasi kebijakan dan program-program yang terkait dengan ketiga fungsi ini, serta memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak positif yang diharapkan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.
2. Selanjutnya Belanja Kesehatan lebih dievaluasi karena masih berpengaruh negatif. Belanja kesehatan harus dilakukan secara optimal dan efektif. Pemerintah harus memastikan bahwa belanja kesehatan digunakan untuk tujuan yang lebih penting dan efektif, seperti meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mengurangi biaya operasional rumah sakit yang tidak efektif.
3. Penulis juga berharap bahwa untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik yang sama akan lebih mengembangkan dan memperdalam cakupan penelitian mulai dari teori sebab akibat tiap variable.
4. Keterbatasan Penelitian ini hanya berdasarkan data APBD, sehingga tidak dapat mewakili secara keseluruhan kondisi keuangan daerah di Indonesia.

REFERENSI

- Dyta Denika Novsilvana. 2017. "Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja, Infrastruktur dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2014".
- BPS Kalimantan Utara. 2023. Pertumbuhan Ekonomi, tersedia pada <https://kaltara.bps.go.id/>. diakses 22 April 2024.
- Didi Adriansyah, SitiAisyah, Adymas Putro Utomo, Sholehah, Enny Harvianty, Ratna Dwi Chrisya nty. 2022. "Analisis Posisi Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara Semasa Pandemi Covid-19". Jurnal Pengabdian Masyarakat. 1 No.1
- Eny Rochaida. 2016. Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kelu arga Sejahtera Di Provinsi Kalimantan Utara.18 No.1.
- Kementerian Keuangan. 2023. APBD Perfungsi. Tersedia pada <https://djpb.kemenkeu.go.id/> .diakses 22 April 2024.
- Chrisman Youlli Karinda,Vantjellat, Lidia Mawikere. Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- Rizky Airy Putri, Zamzami, Selamat Rahmadi. 2021. Pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah.10 No.2.
- Aditia Rinaldi, dkk. 2018. "Pengaruh Belanja Pegawai, Mandatory Spending, dan Pengaruh Ekonomi Terhadap Fiscal Space Seluruh Provinsi Di Sumatera". Jurnal Ekonomi Pembangunan.7 No.2.
- Yusi Aprilia dkk. "Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2019".
- Yeni Sarce Magdalena Lantu, dkk. "Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Kota Bitung".
- Meilissa, dkk. 2021. "Analisis Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur". Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik. Vol. 6 No.2